

Evaluasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sakti Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Novang Tedy Punarto ^{1*}, Bambang Irawan ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ novangtp@gmail.com; ² bbgirw80@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

SAKTI;
Financial Reports;
Policy Evaluation;
Directorate General of Treasury;
Quality of Financial Reports.

This research aims to evaluate the policy of using the SAKTI Application (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) at the Head Office of the Directorate General of Treasury in an effort to improve the quality of financial reports. Accurate and high-quality financial reports are an essential component in realizing accountability and transparency in state financial management. The Sakti Application is expected to help minimize errors and inconsistencies in financial reporting by providing an integrated system, data validation, audit trails, and process standardization. This research uses a qualitative method by collecting data through in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and documentation studies. The evaluation is carried out using criteria developed by William N. Dunn (2021:610), including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy appropriateness. Based on the research results, it shows that the policy of using the Sakti Application has met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy appropriateness and has made a positive contribution to improving the quality of financial reports, but there are still obstacles that need to be resolved. The proposed suggestions include improving IT infrastructure, providing complaint facilities, continuous training, and enhancing data security.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Kuangan negara adalah elemen vital dalam pengelolaan negara, yang stabilitasnya sangat mempengaruhi pembangunan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang terkait. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 dan 2017, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan masalah terkait sistem pengendalian internal, yaitu bahwa sistem informasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) belum terintegrasi. Akibatnya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih mempunyai banyak catatan dan kekurangan meski sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk mengelola keuangan negara, dan terciptalah Aplikasi SAKTI yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBN hingga pelaporan keuangan. Sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan (IFMIS), Aplikasi Sakti mendukung prinsip pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan di tingkat kementerian/lembaga. Namun, beberapa masalah teknis dan operasional, seperti selisih rekonsiliasi internal, ketidakakuratan saldo aset, dan keterlambatan perekaman data, masih

perlu diatasi. Pada LHP LKKL Kementerian Keuangan Tahun 2023, BPK menemukan masalah terkait aplikasi SAKTI yaitu Pemanfaatan aplikasi SAKTI untuk pencatatan aset dan persediaan belum optimal dan pengelolaan persediaan belum tertib. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKTI agar berjalan secara optimal.

Evaluasi ini akan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2021:610), mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan ini serta rekomendasi perbaikan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan akuntabel.

Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana evaluasi kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan?
- b. Apa saja kendala yang dapat ditemukan pada saat evaluasi kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan?
- c. Hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala evaluasi kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI sudah tepat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- b. Untuk mengevaluasi kendala apa saja yang dapat ditemukan pada saat kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Untuk mengevaluasi hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala penggunaan aplikasi SAKTI sudah tepat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi yang digunakan untuk menyelidiki dalam kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti berperan sebagai instrumen, teknik pengumpulan dan analisis data bersifat kualitatif, lebih menekankan pada pemahaman makna. Tujuan metodologi penelitian kualitatif adalah menganalisis dan menggambarkan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu atau kelompok.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn dalam Yati, I.dkk. (2021) terdiri dari 6 variabel yaitu:

- a. Efektivitas Kebijakan
Kebijakan mencapai hasil yang diinginkan yaitu kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat memperkuat pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
- b. Efisiensi Kebijakan

Berkenaan dengan seberapa cepat kebijakan aplikasi sakti dalam proses penyusunan laporan keuangan dan seberapa efisien sumber daya yang digunakan dalam proses penyusunan keuangan

c. Kecukupan Kebijakan

Seberapa jauh hasil kebijakan dapat memecahkan masalah seperti data tidak akurat dan data anomali sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

d. Perataan/Kesamaan Kebijakan

Penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sudah digunakan oleh pegawai pemegang user SAKTI sesuai dengan kewenangannya.

e. Responsivitas Kebijakan

Hasil kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sudah memuaskan semua pihak terkait.

f. Ketepatan Kebijakan

Hasil/ tujuan yang diinginkan kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dapat membawa perbaikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Wekke dkk (2019:46), Purposive sampling adalah teknik dimana pemilihan sumber data didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti orang yang diyakini paling memahami data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat empat pendekatan yang umum digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain:

- Observasi merupakan pengamatan dan pendokumentasian fenomena atau gejala yang sedang dipelajari.
- Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sekurang kurangnya dua orang atas dasar ketersediaan dalam suasana alamiah, dimana pembicaraan mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.
- Dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa masa lalu yang disebut sebagai dokumentasi dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti otobiografi, surat pribadi, novel, buku harian, memorial, kliping koran, dan sebagainya.
- Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai strategi pengumpulan data dengan menggunakan sumber data yang telah ada sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersumber dari Miles dan Huberman dalam Wandu (2013:524), yang terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan secara obyektif, data ini berupa teks dan dokumen

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan, serta memfokuskan data yang mengarah untuk memberikan solusi pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian lainnya

c. Penyajian *Data*

Setelah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian data ini dapat berbentuk tulisan, kata-kata, gambar, grafik maupun tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan data dan mengidentifikasi temuan utama serta implikasi penelitian. Dalam tahap ini, peneliti dapat membandingkan temuan dengan literatur yang relevan dan mengembangkan kerangka teoretis yang mendasari hasil penelitian.

Uji Keabsahan Data

Mulyadi (2016:169-173) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan data yang telah dikumpulkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan beberapa cara berikut ini:

- a. Uji *Credibility* yaitu pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, member check, pengecekan sejawat, perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan analisis kasus negatif.
- b. Uji *Transferability* yaitu berkenaan dengan pertanyaan, sejauh mana temuan dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam konteks yang berbeda.
- c. Uji *Dependability* yaitu dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti benar-benar turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai dengan membuat suatu kesimpulan.
- d. Uji *Confirmability* yaitu menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berhasil membuat laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang disusun dari aplikasi SAKTI telah memberikan informasi yang tepat waktu, menghasilkan data yang akurat, akuntabel, dapat dipercaya, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya serta menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami bagi pemangku kepentingan serta memperkuat pertanggungjawaban dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

b. Efisiensi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah memenuhi kriteria efisiensi kebijakan karena dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SAKTI.

c. Kecukupan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Ditjen perbendaharaan sudah memenuhi kriteria kecukupan kebijakan karena mengurangi terjadinya data anomali dan data tidak akurat pada laporan keuangan.

d. Perataan/Kesamaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah diimplementasikan secara menyeluruh dan merata pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini diketahui dari kesimpulan berdasarkan *selective coding* yaitu semua stakeholder ddalam hal ini pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai proporsinya sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-99/PB.1/2023 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-59/PB.1/2020 Tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

e. Responsivitas Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan untuk kriteria Responsivitas Kebijakan bahwa implementasi evaluasi penggunaan aplikasi SAKTI telah memuaskan pihak yang terkait pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini diketahui dari kesimpulan bahwa sejak digunakannya Aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, relevan dan akuntabel sehingga diterima oleh auditor BPK.

f. Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan untuk kriteria Ketepatan Kebijakan bahwa kebijakan evaluasi penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membawa perbaikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

KESIMPULAN

- a. Implementasi Evaluasi kebijakan penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK05/2019 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sudah memenuhi kriteria efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan/ kesamaan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*) dan ketepatan (*appropriateness*) sehingga sudah tepat dan mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan evaluasi penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain:
 - 1) Adanya payung hukum yang mendasari penggunaan aplikasi SAKTI yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK05/2019 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
 - 2) Adanya komitmen yang tinggi dan dukungan penuh pimpinan sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.
 - 3) Adanya tuntutan terkait transparansi dan akuntabilitas proses penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang berkualitas, andal, relevan, transparan dan akuntabel.
 - 4) Kemudahan sistem layanan yang ditawarkan, dengan adanya sistem ini instansi pemerintah dapat melakukan menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan cepat, kapanpun dan dimanapun hanya dengan menggunakan jaringan internet.
 - 5) Adanya simplifikasi proses penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan konsep penggunaan *single database* dan *single entry point* transaksi.

- 6) Adanya dukungan dari pembuat aplikasi dengan menyediakan layanan Helpdesk (HAI DJPb) yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi saat terdapat kendala/hambatan dalam penggunaan aplikasi SAKTI
- c. Faktor-faktor yang menghambat evaluasi penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain:
- 1) Faktor infrastruktur teknologi dan Informasi (IT). Aplikasi SAKTI masih tergantung pada koneksi internet dan apabila terdapat penggunaan aplikasi SAKTI secara bersamaan maka akan mengganggu kecepatan aplikasi SAKTI tersebut.
 - 2) Faktor Sumber Daya Manusia. Ketika ada operator baru, mereka akan kurang paham terhadap menu-menu pada aplikasi akibat dari kurangnya sosialisasi terkait update fitur-fitur pada aplikasi SAKTI.
 - 3) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar unit kerja terkait data dan informasi keuangan, sehingga dapat menghambat proses penyusunan laporan keuangan.
 - 4) Lambatnya respon pembuat aplikasi SAKTI ketika ada perubahan kebijakan.
 - 5) Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan aplikasi SAKTI mengakibatkan identifikasi dan penanganan masalah menjadi terlambat, sehingga hal tersebut dapat menghambat penyusunan laporan keuangan yang berkualitas .
 - 6) Perubahan peraturan yang sering terjadi terkait penyusunan laporan keuangan dapat menyulitkan adaptasi sistem dan aplikasi SAKTI, sehingga berakibat pada kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, Roni Awaludin dan Meirinawati. 2018. *Analisis Kesiapan Pelayanan Pembayaran Tol Elektronik (E-Toll) di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Surabaya*. Surabaya : Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 5, Hlm. 1-8.
- [2] Ali, Faried *et.al.* 2012. *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika Aditama.
- [3] Amriani dan Iskandar. (2020). Analisis keadaan penerapan sistem akuntansi keuangan (SAKTI) berbagai satuan dan lembaga pengelola perekonomian dan pendidikan.
- [4] Anggadini, S. D. (2018). *Quality Of Financial Information Management System On Quality Of Financial Statements Of Local Government*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9, 113–117.
- [5] Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- [6] Asyifa (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Penggunaan Aplikasi SAKTI: Integrasi Pengelolaan Keuangan Dan Laporan Pertanggungjawaban (Studi Kasus di Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak). Asyifa (2020).
- [7] Badan Pemeriksa Keuangan RI. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan/ diakses pada 5 Juni 2024
- [8] Bungin, Burhan M. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [9] Creswell, John W. (Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [10] Dewi, P Ayu Ratna dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan*. Denpasar: Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 3, Hlm. 442-457.

- [11] Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung : Pustaka Setia.
- [12] Dunn, William N. (Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, *et.al*). 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [13] Febriyanto, I. I. 2012. *Studi Komparasi Teori New Public Management dengan Good Governance dalam Perspektif Kebijakan Publik*. <http://lintassosialpolitik.blogspot.com/2012/10/teori-new-publicmanagement.html>, diakses 14 Juli 2023.
- [14] Gumilang, Galang Surya. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. Kediri: Jurnal Fokus Konseling, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 144-159.
- [15] Hayat. 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- [16] Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [17] Istianto, Bambang dan Taufik Maulamin. 2017. *Kebijakan Transportasi On Line dan Konflik Sosial*. Jakarta: Jurnal Ilmu Administrasi Negara-ASIAN, Volume 5 Nomor 2, Hlm. 99-136.
- [18] Istianto, Bambang. 2015. *Gaya Manajemen Bisnis VS Peran Negara Kuat Dalam Mengurus Negara, Konsep dan Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [19] Kementerian Keuangan RI. 2023. *Apa itu SAKTI?* <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>, diakses 14 Mei 2024.
- [20] Kieso, Donald, E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. (2012). *Akuntansi Intermediate* (Terjemahan Gina Grahia dan Ichsan Setiyo Budi (ed.); Edisi Kese). Erlangga: Jakarta.
- [21] Makmur, dan Rohana Thahier. 2016. *Konseptual dan Konstektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- [22] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- [23] Mulyadi, Mohammad. 2016. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Publica Press.
- [24] Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- [25] Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books.
- [26] Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [27] Patriot Budi Prayitno (2020). Analisis Kebijakan Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).
- [28] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK05/2019 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
- [29] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- [30] Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). *Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementation*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 29, 104–137.
- [31] Rachman, Abdul. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- [32] Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Garut : Jurnal Publik ISSN:1412-7083, Volume 11 Nomor 01, Hlm. 1-12.

-
- [33] Ratnaningsih, Kadek Indah dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana. 2014. *Pengaruh Kecanggihan Tehnologi Informasi, Partisipasi Manajemen dan Pengetahuan Manajer Akuntansi pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi*. Denpasar : Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 1-16.
- [34] Ridha, Nikmatur. 2017. *Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian*. Medan : Jurnal Hikmah, Volume 14 Nomor 1, Hlm. 62-70.
- [35] Romney & Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Terjemahan oleh Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari (ed.); 13th ed.). Salemba Empat: Jakarta.
- [36] Sahara, H. 2016. *Evaluasi Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara: Studi pada KPPN Yogyakarta*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- [37] Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- [38] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- [39] Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya: Bandung.
- [40] Syaifur Rahman, Sugeng Hartanto dan Avisenna Harkat. (2023). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- [41] Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- [42] Wekke, Ismail Suardi et.al. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gawe Buku.
- [43] Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Media Nusa Creative.
- [44] Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).